



RENCANA STRATEGI

**BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT GORONTALO**

TAHUN 2015 – 2019



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
GORONTALO**

Jalan H. adam Hoesa No. 106, Pentadio Timur, Telaga Biru, Gorontalo 96181
Telp/Fax: (0435) 882487 Email: pauddikmasgorontalo@kemdikbud.go.id



RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGEMBANGAN PAUD DAN DIKMAS
GORONTALO

TAHUN 2015 - 2019

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT

BP PAUD DAN DIKMAS GORONTALO
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) BP PAUD dan Dikmas Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015-2019. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyatakan bahwa BP PAUD dan Dikmas Gorontalo adalah salah satu UPT Kemendikbud di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat berada di bawah binaan dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

BP PAUD dan Dikmas Gorontalo melaksanakan Tugas sebagai Pengembangan Program/Model dan Mutu Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, BP PAUD dan Dikmas memiliki fungsi melaksanakan pemetaan mutu pendidikan, pengembangan program, supervisi, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program, dan pengembangan sumber daya serta pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Dalam penyusunan Renstra ini juga mempertimbangkan karakteristik Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat yang dinamis. Jika dilihat dari waktu, tempat proses belajar, peserta didik dan bahkan pendekatan pendidikan yang digunakan pada jalur Pendidikan Nonformal, maka dalam mengukur indikator, output, outcome berbeda dengan Pendidikan formal. Hal utama yang ditekankan dalam Renstra ini adalah Paradigma Pendidikan yang mendasarinya, pilar-pilar strategi sebagai acuannya, visi, misi dan tujuan BP PAUD dan Dikmas tidak hanya demi pemenuhan hak-hak warga negara dalam layanan Pendidikan melainkan untuk menjangkau yang tak terlayani, baik yang disebabkan factor ekonomi maupun karena kendala geografis.

Rencana Strategi BP PAUD dan Dikmas Gorontalo harus menjadi dasar dan pedoman bagi Pejabat di lingkungan BP PAUD dan Dikmas Gorontalo, dan sebagai acuan dalam menyusun (1) Rencana Kerja (Renja) Tahunan; (2) Program dan kegiatan pembangunan lintas sektoral bidang PAUD dan Dikmas secara terstruktur dan terarah; (3) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup BP PAUD dan

Dikmas di wilayah kerja BP PAUD dan Dikmas; (4) Laporan Tahunan; dan (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Selain itu, Renstra ini merupakan acuan dalam upaya pencapaian target dan sasaran pembinaan layanan pendidikan anak usia dini, pembinaan layanan kursus dan pelatihan, pembinaan layanan pendidikan masyarakat, dan pembinaan lainnya agar program-program tersebut dapat berjalan secara efektif sesuai mekanisme yang ada. Akhirnya semoga rencana strategis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Gorontalo, Januari 2017
Kepala BP PAUD DIKMAS Gorontalo,

Drs. H. Bambang Kunaedi, M.Si.
NIP 19650309 199802 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Landasan Filosofis.....	3
D. Paradigma Pendidikan.....	5
E. Kondisi Umum.....	6
F. Potensi dan Permasalahan.....	16
G. Pilar Strategi.....	
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI .	
A. Visi, Misi BP PAUD dan Dikmas Gorontalo.....	22
B. Tujuan Strategi	23
C. Sasaran Strategi.....	25
D. Tata Nilai.....	27
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI , KERANGKA REGULASI , KERANGKA PENDANAAN, DAN KELEMBAGAAN	
A. Arah Kebijakan dan Strategi.....	30
B. Kerangka Regulasi.....	31
C. Kerangka Pendanaan.....	
D. Kerangka Kelembagaan.....	32
BAB IV KERANGKA IMPLEMENTASI , TARGET KINERJA	
A. Kerangka Implementasi.....	30
B. Target Kinerja.....	31
C. Strategi Pendanaan.....	
D. Koordinasi, Tata Kelola dan Pengendalian Mutu.....	32
BAB PENUTUP.....	36
LAPIRAN:	
- MATRIKS KINERJA RENSTRA BP PAUD DAN DIKMAS GORONTALO 2015-2019	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKAANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Negara Republik Indonesia (RPJM) Tahun 2015-2019 telah menetapkan sembilan agenda prioritas, yang dikenal sebagai Nawacita, yang sepenuhnya berlandaskan ideologi Trisakti. Ideologi Trisakti mencakup kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nawacita meliputi:

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- b. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic;
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa, serta;
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya berfungsi sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal, diarahkan untuk meningkatkan mutu dan daya saing SDM Indonesia pada era perekonomian berbasis pengetahuan (knowledge based economy) dan pembangunan ekonomi kreatif. Pendidikan Nonformal dan

Informal bagian dari pendidikan nasional berusaha mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan dari ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik yang diberlakukan sepanjang hayat yang merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik, seyogyanya menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu, sehingga cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai.

Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bergerak di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Pada Tahun 2017 telah mengalami perubahan dengan beralihnya 21 BPKB UPTD Provinsi menjadi UPT Pusat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP PAUD dan Dikmas. BP PAUD dan Dikmas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan program dan pengembangan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BP-PAUD dan Dikmas menyelenggarakan fungsi: (1) pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (2) pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (3) supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (4) fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (5) pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (6) pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan (7) pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; serta (8) pelaksanaan urusan administrasi BP PAUD dan Dikmas.

BP PAUD dan Dikmas Gorontalo sebagai UPT yang baru bergabung, tentunya dalam pelaksanaan program kegiatan banyak mengalami kendala dan kelemahan dalam peningkatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat khususnya di Provinsi Gorontalo. Hal ini disebabkan oleh berbagai aspek diantaranya ekonomi, geografis, infrastuktur pendidikan sehingga kesulitan dalam mengakses layanan Pendidikan. Fungsi perencanaan,

monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan ketenagaan, serta dukungan infrastruktur secara umum turut menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Di sisi lain, kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan Pendidikan belum sepenuhnya dapat direalisasikan secara optimal.

Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Gorontalo memiliki wilayah kerja sebanyak 6 (enam) Kabupaten/Kota yang terdiri dari Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk memberikan Layanan Prima terhadap Pengkajian, Pengembangan Model dan Pengendalian Mutu Satuan dan Program PAUD dan Dikmas dalam meningkatkan Pendidikan dan Pembelajaran untuk mencapai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP), BP PAUD dan Dikmas di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu membangun komunikasi, konsultasi dan koordinasi serta kerjasama dengan berbagai pihak dan stakeholder baik di tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi sampai ke tingkat Pusat, sehingga berbagai kesulitan dan kendala dalam pelaksanaan program kegiatan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dapat teratasi secara maksimal, efektif dan efisien.

Dalam rangka memberikan arah kebijakan dan pembangunan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang memadai bagi para penentu kebijakan dan para penyelenggara pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya pelaksanaan program pendidikan pada jalur Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat di Provinsi Gorontalo, perlu disusun Rencana Strategis Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Gorontalo 2015—2019, dengan menggunakan data dasar perkembangan pembangunan pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal tahun 2016.

Renstra ini menguraikan kondisi saat ini dan analisis situasi, tantangan, peluang dan hambatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan, serta anggaran yang diperlukan BP-PAUD dan Dikmas Gorontalo dalam kurun waktu 2015-2019.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Tahun 2015-2019 BP PAUD dan Dikmas Gorontalo adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Permendikbud nomor 17 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019
8. Permendikbud Nomor 22 tahun 2015 tentang Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

C. LANDASAN FILOSOFIS

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI, bahwa perkembangan kesejarahan Pendidikan Luar Sekolah telah menunjukkan eksistensinya sebagai jalur pendidikan yang berperan untuk membelajarkan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya serta penyambung pendidikan formal dalam mewujudkan Pendidikan sepanjang hayat atau Life Long Learning.

Pendidikan nonformal dan informal sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih dikenal dengan nama Pendidikan Luar Sekolah dan/atau Pendidikan Masyarakat. Pada

awal Kemerdekaan RI dengan dibentuknya Kabinet Pertama, Jawatan Pendidikan Masyarakat masuk dalam Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Pengajaran dan UPTnya Pusat Belajar Masyarakat serta berubah menjadi UPT Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan keaksaraan atau pemberantasan buta huruf, pendidikan kader pembangunan desa, pendidikan wanita dan kursus keterampilan untuk orang dewasa.

Prinsip pendidikan masyarakat (pendidikan non formal dan informal) sebagai perwujudan dari Pendidikan Sepanjang Hayat adalah bahwa belajar berlangsung mulai lahir sampai dengan meninggal, sehingga tidak ada kata berhenti belajar. Itulah prinsip pendidikan nonformal yang dicetuskan para penggagas pendidikan nonformal seperti Ivan Illich dan Paulo Freire. Prinsip itu semakin relevan jika diimplementasikan pada abad 21 ini, dimana masyarakat banyak yang karena sesuatu hal tidak memiliki kesempatan mengikuti pendidikan formal dan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Pada kondisi seperti itu maka peran pendidikan nonformal dan informal sangat Strategis.

Belajar sepanjang hayat (life long learning) merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal. Belajar sepanjang hayat berasumsi bahwa proses belajar terjadi seumur hidup walaupun dengan cara yang berbeda dan proses yang berbeda. Tujuan layanan pendidikan nonformal adalah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang tidak diperoleh dari Pendidikan formal, mengatasi dari kemunduran pendidikan sebelumnya, untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, meningkatkan keahlian, mengembangkan kepribadian atau untuk beberapa tujuan lainnya (Cropley, 1972). Dengan pemaknaan seperti itu maka keberadaan pendidikan nonformal dan informal dapat memainkan peran sebagai pengganti (substitute), pelengkap (complement), dan/atau penambah (supplement) dari pendidikan formal.

Filosofi tersebut di atas, telah menempatkan pendidikan nonformal dan informal pada posisi Strategis dalam keseluruhan sistem Pendidikan nasional. Filosofi tersebut menjadikan pendidikan nonformal dan informal

Rencana Strategis BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur 2015-2019, Edisi Revisi memiliki karakteristik tersendiri yang unik dan spesifik sehingga sangat berbeda dengan karakteristik pendidikan formal. Keunikan Pendidikan nonformal tersebut dapat disimak dari penjelasan Sudjana (2000) yang mengidentifikasi karakteristik pendidikan nonformal dari lima (5) perspektif yakni: pertama, ditinjau dari tujuannya, pendidikan nonformal bersifat jangka pendek dan khusus, serta kurang menekankan pada ijazah. Kedua, ditinjau dari waktunya, relatif singkat, lebih menekankan pada masa sekarang dan menggunakan waktu tidak terus menerus. Ketiga, ditinjau dari isi programnya, kurikulum berpusat pada kepentingan warga belajar, mengutamakan penerapan. Keempat, ditinjau dari proses pembelajarannya, pendidikan nonformal dipusatkan di lingkungan masyarakat, berkaitan dengan kehidupan warga belajar dan masyarakat. Kelima, ditinjau dari aspek pengendaliannya, dikendalikan secara bersama-sama oleh pelaksana program dan warga belajar, serta mengutamakan pendekatan demokratis dengan tidak mengenyampingkan mutu, standar dan kualitas proses maupun hasil pendidikannya.

D. PARADIGMA PENDIDIKAN

Belajar sepanjang hayat adalah merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal. Belajar sepanjang hayat bahwa proses belajar terjadi seumur hidup, walaupun dengan cara yang berbeda dan proses yang berbeda. Tujuan layanan pendidikan nonformal adalah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang tidak diperoleh dari pendidikan formal. Keberadaan pendidikan nonformal dan informal memainkan peran sebagai pengganti, pelengkap atau penambah dari pendidikan formal.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbud RI yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, BP PAUD dan Dikmas memiliki tugas dan fungsi dalam pengembangan model/program, pengembangan mutu satuan PAUD dan Dikmas dan peningkatan kompetensi

maka paradigma pendidikan mengacu pada tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh Dirjen PAUD dan Dikmas.

Penyelenggaraan pendidikan, pengembangan model/program dan peningkatan kompetensi PTK PAUD dan Dikmas didasarkan pada beberapa paradigma umum yang perlu diperhatikan dan dikaji secara seksama khususnya hal sebagai berikut;

1. Pemberdayaan Manusia Seutuhnya

Memperlakukan peserta didik melalui pendidik dan tenaga kependidikan sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, sosial, dan kinestetik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk berhasil sebagai pribadi yang mandiri (makhluk individu), sebagai elemen dari sistem sosial yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain (makhluk sosial) dan sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka bumi (makhluk Tuhan).

2. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Masyarakat.

Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat setiap saat tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu.

Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur Pendidikan (multi entry-multi exit system). Pendidikan multi makna diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (life skills). Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong masyarakat menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, sportif, dan berkewirausahaan.

3. Pendidikan untuk Semua

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, adalah amanat konstitusi.

Hak untuk mendapatkan pendidikan sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem Pendidikan terbuka dan demokratis serta bertindak gender agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.

Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada masyarakat yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu melalui layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk optimalisasi peranserta masyarakat, pemberdayaan organisasi mitra dan program pemberdayaan masyarakat sehingga menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis, merata, dan berkeadilan serta bertindak gender.

4. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan

Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat.

5. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar

Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan

menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik.

6. Pendidikan Membentuk Karakter

Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup.

7. Sekolah yang Menyenangkan

Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa.

E. KONDISI UMUM

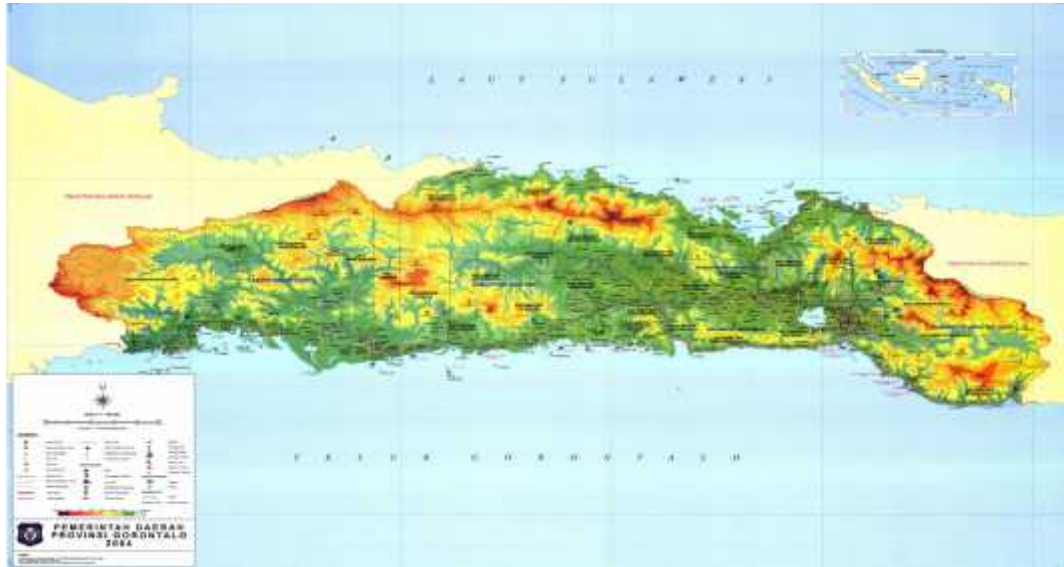
1. Kondisi Eksternal Wilayah Kerja BP PAUD dan Dikmas Gorontalo

Provinsi Gorontalo merupakan daerah pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo dimana pada awal terbentuknya Provinsi Gorontalo baru memiliki 2 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo. Seiring dengan perkembangan daerah dan berdasarkan aspirasi masyarakat, maka Provinsi Gorontalo saat ini memiliki 6 wilayah pemerintahan yang terdiri dari 1 Kota yaitu Kota Gorontalo dan 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara.

Wilayah Gorontalo terletak di antara 0°19' – 1°15' Lintang Utara dan 121°23' - 123°43' Bujur Timur. Dari posisi tersebut wilayah ini berbatasan langsung dengan dua Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah

Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Peta Wilayah Kerja BP PAUD dan Dikmas Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 1.1 Peta Wilayah Kerja BP PAUD dan Dikmas Gorontalo.

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kerja BP PAUD dan Dikmas Gorontalo



Luas wilayah Provinsi Gorontalo 12.215,44 km² , jika dibandingkan dengan Wilayah Indonesia luas Provinsi Gorontalo hanya sebesar 0,63 persen, terdiri dari 6 (enam) wilayah pemerintahan yakni 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota dengan luas wilayah, jumlah Kecamatan dan Desa, sebagaimana tercantum dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kerja BP PAUD dan Dikmas Gorontalo

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH (km ²)	KECAMATAN	DESA
1.	Kota Gorontalo	66,25 km ²	9	50
2.	Kabupaten Gorontalo	2.207,58 km ²	19	191
3.	Kabupaten Boalemo	2.517,36 km ²	7	82
4.	Kabupaten Pohuwato	4.244,31 km ²	13	101
5.	Kabupaten Bone Bolango	1.889,04 km ²	18	160
6.	Kabupaten Gorontalo Utara	1.676,15 km ²	11	123
	JUMLAH	12.215,44 km ²	77	707

2. Kondisi Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Provinsi Gorontalo

Parameter kelayakan Lembaga Satuan PAUD dan Dikmas sebagai penyelenggara Program PAUD dan Dikmas adalah ketercapaian indikator-indikator SNP yang dirumuskan oleh BAN PAUD dan PNF yang meliputi delapan standar. Delapan standar Nasional Pendidikan tersebut adalah :1) standar kompetensi lulusan, 2) standar isi, 3) standar proses, 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar penilaian, 7) standar pengelolaan, 8) standar pembiayaan.

Sasaran dan ruang lingkup peningkatan mutu program dan/atau satuan adalah seluruh satuan PAUD dan Dikmas yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Rumah Pintar, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai satuan pendidikan, dan satuan pendidikan sejenis lainnya.

Kondisi penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat pada Lembaga Satuan PAUD dan Dikmas di Provinsi Gorontalo secara umum dapat diuraikan pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Data Lembaga Satuan PAUD dan Dikmas Gorontalo sebagai penyelenggaraan Program PAUD dan Dikmas

NO	KABUPATEN/KOTA	PAUD	PKBM	LKP	SKB
1	Kota Gorontalo	259	13	69	1
2	Kabupaten Gorontalo	469	36	43	3
3	Kabupaten Pohuwato	262	14	6	1
4	Kabupaten Boalemo	278	11	2	1
5	Kabupaten Bone Bolango	325	19	26	1
6	Kabupaten Gorontalo Utara	200	6	2	3
	Total	1.793	99	148	10

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu program prioritas pembangunan pendidikan nasional, yang diarahkan demi

mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan, dengan pelayanan pendidikan merata dan berkualitas serta memastikan bahwa seluruh anak laki-laki dan perempuan memperoleh akses terhadap pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak, perawatan dan pendidikan pra-SD (PAUD) yang bermutu untuk menjamin kesiapan memasuki pendidikan dasar. Kebijakan tersebut didasarkan pada prinsip ketersediaan lembaga PAUD yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, keterjangkauan layanan PAUD sesuai dengan kemampuan masyarakat, kualitas layanan PAUD dalam mendidik dan mengasuh anak usia 0-6 tahun, kesetaraan layanan PAUD untuk setiap kelompok masyarakat, dan kepastian setiap anggota masyarakat dalam memperoleh layanan PAUD.

b. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai salah satu satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di luar pendidikan formal, pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta ketentuan lain yang berlaku.

Penyelenggaraan program PKBM perlu distandarisasi secara nasional dengan tujuan untuk menjamin mutu pendidikan nonformal dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membentuk watak, karakter, dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat. Fungsinya adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan nonformal sebagai upaya mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Melalui program Pendidikan Kesetaraan paket tersebut siswa akan mendapatkan pelajaran setara dengan tingkatannya. Di akhir program siswa bisa mengikuti ujian kejar paket (atau biasa disebut dengan istilah ujian persamaan atau ujian kesetaraan) untuk mendapatkan Sertifikat/Ijazah sebagai tanda kelulusan, yang kemudian dapat dipakai untuk mendaftar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik ke sekolah menengah ataupun ke perguruan tinggi, atau bagi yang hendak langsung bekerja, Ijazah juga dapat dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan lamaran kerja.

Standarisasi adalah kriteria minimal yang ditentukan untuk menjadi tolok ukur penyelenggaraan kegiatan. Ada 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 untuk menjadi acuan penyelenggaraan program di PKBM, yaitu:

1. Standar Isi

a. Kurikulum

- 1) Memiliki struktur kurikulum
- 2) Memiliki model kurikulum
- 3) Memiliki kalender pendidikan

b. Evaluasi Kurikulum

- 1) Memiliki prosedur evaluasi kurikulum.
- 2) Memiliki prosedur penetapan model kurikulum.
- 3) Memiliki frekuensi evaluasi kurikulum.
- 4) Memiliki tim evaluasi dan pengembang kurikulum

2. Standar Proses

- a. Memiliki model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik wilayah.
- b. Memiliki perencanaan yang berupa silabus dan pelaksanaan pembelajaran yang memuat tujuan pembelajaran, indikator, materi ajar, metode, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.
- c. Melaksanakan proses belajar dengan mengembangkan budaya baca berhitung dan menulis.

- d. Menerapkan proses pembelajaran berbasis life skill
- 3. Standar Kompetensi Lulusan
 - a. Memiliki prosedur penentuan kompetensi utama
 - b. Memiliki prosedur penentuan kompetensi penunjang
 - c. Memiliki prosedur penentuan kompetensi lainnya
- 4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - a. Pendidik
 - 1) Memiliki kualifikasi pendidik
 - 2) Memiliki kriteria minimum yang dipersyaratkan
 - 3) Memiliki kompetensi pendidik
 - 4) Melakukan pengembangan kompetensi pendidik
 - b. Tenaga Kependidikan
 - 1) Memiliki kualifikasi tenaga kependidikan
 - 2) Memiliki kriteria minimum yang dipersyaratkan
 - 3) Memiliki kompetensi tenaga kependidikan
 - 4) Melakukan pengembangan mutu tenaga kependidikan
- 5. Standar Sarana dan Prasarana
 - a. Memiliki sarana yang meliputi: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
 - b. Ada prasarana yang meliputi gedung, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang baca/TBM, ruang praktik dan ruang lainnya yang diperlukan.
- 6. Standar Pengelolaan
 - a. Pengelolaan PKBM menerapkan manajemen berbasis masyarakat yang ditunjukkan dengan kemitraan, partisipasi masyarakat, keterbukaan, dan akuntabilitas.
 - b. Pengambilan keputusan dilakukan oleh rapat pengelola.

- c. Memiliki pedoman yang mengatur: kurikulum, kalender pendidikan, struktur organisasi, pembagian tugas pendidik dan kependidikan, dan pelaksanaan pembelajaran.
- d. Memiliki visi, misi, dan tujuan lembaga.
- e. Memiliki program kerja.
- f. Memiliki pedoman sistem pengawasan dan evaluasi program.
- g. Memiliki pedoman prosedur pelaporan.

7. Standar Pembiayaan

- a. Mempunyai biaya operasional.
- b. Mempunyai biaya ATK.
- c. Mempunyai biaya perawatan sarana dan prasarana
- d. Mempunyai biaya pengembangan pendidikan dan keterampilan

8. Standar Penilaian

- a. Memiliki model pengukuran, penilaian, dan evaluasi secara nasional
- b. Memiliki model pengukuran, penilaian, dan evaluasi ditingkat PKBM
- c. Memiliki model pengukuran, penilaian, dan evaluasi ditingkat tutor
- d. Memiliki acuan dan model penilaian keterampilan.

c. Lembaga Kursus dan Pelatihan

Kursus adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan dan keterampilan yang diberikan dalam waktu singkat. Pelatihan setiap usaha untuk memperbaiki prestasi kerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggungjawabnya.

Tingkat keberhasilan lembaga kursus tersebut dalam mengeluarkan lulusan yang dapat bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Kegiatan layanan kursus dan pelatihan mencakup upaya-upaya diantaranya :

- 1) Meningkatkan ketersediaan layanan penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang merata, bermutu, dan berkeadilan bagi

masyarakat untuk dapat bekerja atau berusaha mandiri (berwirausaha)

- 2) Meningkatkan ketersediaan jumlah penguji kompetensi kursus dan pelatihan yang professional
- 3) Meningkatkan ketersediaan jumlah lembaga kursus dan pelatihan rintisan dipedesaan
- 4) Meningkatkan kapasitas lembaga kursus ditingkat nasional dan internasional untuk meningkatkan daya saing lembaga dan lulusan
- 5) Meningkatkan ketersediaan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
- 6) Meningkatkan jumlah standart mutu penyelenggaraan kursus dan pelatihan untuk dan program pendidikan kewirausahaan masyarakat
- 7) Meningkatkan jumlah sasaran penilaian kinerja lembaga kursus dan pelatihan untuk membantu mempercepat akreditasi lembaga kursus dan pelatihan
- 8) Meningkatkan penerapan sistem pembelajaran dan bantuan uji kompetensi atau sertifikasi kompetensi kursus dan pelatihan yang berkualitas dan proporsional.

d. Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar

Berdasarkan Permendikbus Nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsinya Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, disebutkan bahwa Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai Lembaga Pendidikan Non Formal sejenis di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Secara teknis administratif SKB bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota, dan secara edukatif SKB dibina oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab pada pelaksanaan program PAUD dan Dikmas di Kabupaten Kota.

Untuk meningkatkan kinerjanya, maka perlu dilakukan Standarisasi secara menyeluruh dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sanggar

Kegiatan Belajar sebagai Lembaga Pendidikan nonformal yang berbeda dengan Satuan Pendidikan non formal lainnya, oleh karena itu Standarisasi SKB lebih menekankan pada aspek pengelolaan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Standar Proses Pembelajaran.

Kondisi Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Provinsi
Gorontalo sebagai berikut:

NO	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	STATUS	JUMLAH PAMONG BELAJAR
1.	SKB Kota Gorontalo	Satuan PNF	25 orang
2.	SKB Limboto	Satuan PNF	12 orang
3.	SKB Tolangohula	Satuan PNF	3 orang
4.	SKB Batudaa	Satuan PNF	10 orang
5.	SKB Bone Bolango	Satuan PNF	9 orang
6.	SKB Atinggola	Satuan PNF	4 orang
7.	SKB Kwandang	Satuan PNF	8 orang
8.	SKB Sumalata	UPTD/Tidak Aktif	-
9.	SKB Boalemo	Satuan PNF	7 orang
10.	SKB Pohuwato	Satuan PNF	8 orang
Jumlah Pamong Belajar			86 orang

3. Kondisi Data Lembaga PAUD dan Dikmas yang sudah Terakreditasi

**REKAPITULASI SATUAN PENDIDIKAN
PAUD-LKP DAN PKBM SE PROVINSI GORONTALO**

NAMA LEMBAGA	JUMLAH LEMBAGA	JUMLAH LEMBAGA YANG TERAKREDITASI			TOTAL SUDAH TERAKREDITAS	BELUM TERAKREDITAS
		TAHUN 2016	TAHUN 2017			
			TAHAP I	TAHAP II		
PAUD	1,793	131	141	53	325	1,468
PKBM	78	13	5	51	69	9
LKP	58	6	4	2	12	46
JUMLAH	1,929	150	150	106	406	1,523

DATA PAUD PROVINSI GORONTALO

KAB/KOTA	JUMLAH LEMBAGA	JUMLAH LEMBAGA YANG TERAKREDITASI			TOTAL SUDAH TERAKREDITASI	BELUM TERAKREDITASI
		TAHUN 2016	TAHUN 2017			
			TAHAP I	TAHAP II		
KOTA GORONTALO	259	29	26	3	58	201
KAB. GORONTALO	469	29	27	10	66	403
KAB. BOALEMO	278	31	48	20	99	179
KAB. POHUWATO	262	19	33	15	69	193
KAB. BONBOL	325	7	4	1	12	313
KAB. GORUT	200	16	3	4	23	177
JUMLAH	1,793	131	141	53	327	1,466

DATA PKBM PROVINSI GORONTALO

KAB/KOTA	JUMLAH LEMBAGA	JUMLAH LEMBAGA YANG TERAKREDITASI			TOTAL SUDAH TERAKREDITASI	BELUM TERAKREDITASI
		TAHUN 2016	TAHUN 2017			
			TAHAP I	TAHAP II		
KOTA GORONTALO	8	1	1	5	7	1
KAB. GORONTALO	28	3	1	20	24	4
KAB. BOALEMO	10	3	2	5	10	-
KAB. POHUWATO	15	2	-	13	15	-
KAB. BONBOL	9	2	-	4	6	3
KAB. GORUT	8	2	1	4	7	1
JUMLAH	78	13	5	51	69	9

DATA LKP PROVINSI GORONTALO

KAB/KOTA	JUMLAH LEMBAGA	JUMLAH LEMBAGA YANG TERAKREDITASI			TOTAL SUDAH TERAKREDITASI	BELUM TERAKREDITASI
		TAHUN 2016	TAHUN 2017			
			TAHAP I	TAHAP II		
KOTA GORONTALO	35	2	3	2	7	28
KAB. GORONTALO	15	1	1	-	2	13
KAB. BOALEMO	-	-	-	-	-	-
KAB. POHUWATO	1	1	-	-	1	-
KAB. BONBOL	5	2	-	-	2	3
KAB. GORUT	2	-	-	-	-	2
JUMLAH	58	6	4	2	12	46

4. Kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas

Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Lembaga Satuan PAUD dan Dikmas di wilayah kerja BP PAUD dan DIKMAS Gorontalo tahun 2016/2018 diuraikan pada tabel berikut ini:

NO	KABUPATEN/KOTA	PAUD		PKBM		LKP		SKB	
		PENGE LOLA	PEN DIDIK	PENGE LOLA	TUTOR	PENGE LOLA	INSTRUK TUR	PB	TUTOR BANTU
1	Kota Gorontalo	291	518	13	39	69	69	25	7
2	Kabupaten Gorontalo	501	938	36	72	43	43	25	17
3	Kabupaten Pohuwato	262	524	14	42	6	6	8	5
4	Kabupaten Boalemo	278	556	11	22	2	2	7	4
5	Kabupaten Bone Bolango	325	650	19	30	26	26	9	5
6	Kabupaten Gorontalo Utara	200	400	6	18	2	4	12	9
Total		1.793	3.586	99	223	148	150	86	47

Penyusunan rencana aksi pengembangan sumber daya PAUD dan DIKMAS meliputi unsur-unsur ketenagaan sebagai berikut:

a. Pendidik PAUD dan DIKMAS

- (b) Pamong Belajar, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model/program dan pembuatan percontohan serta penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program PAUD dan DIKMAS
- (c) Pendidik PAUD, yaitu tenaga honor yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menyelenggarakan pembelajaran bagi anak usia dini.
- (d) Instruktur Kursus, yaitu tenaga yang memiliki kompetensi dan sertifikasi pada bidang keterampilan tertentu, yaitu tenaga yang diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan / mengelola pembelajaran pada suatu satuan PAUD dan DIKMAS
- (e) Tutor, yaitu tenaga yang berasal dari masyarakat yang bertugas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran pada pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C), serta pendidikan keaksaraan fungsional.

b. Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS

Tenaga kependidikan PAUD dan DIKMAS yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan PAUD dan DIKMAS. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan PAUD dan Dikmas.

Tenaga kependidikan PAUD dan DIKMAS di Provinsi Gorontalo, meliputi:

- 1) Penilik, yaitu PNS yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilikan PAUD yang sering juga disebut Penilik PAUD.
- 2) Kepala SKB, yaitu PNS yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin SKB.
- 3) Tenaga administrasi pada SKB, yaitu PNS yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang melaksanakan administrasi di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- 4) Pengelola atau Tenaga administrasi pada kelompok belajar pada satuan PAUDNI, yaitu orang yang mendirikan, mengelola, mengadministrasikan kegiatan guna menunjang penyelenggaraan kelompok belajar tersebut.
- 5) Pengelola atau tenaga administrasi pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yaitu orang yang mendirikan, mengelola dan mengadministrasi kegiatan guna menunjang penyelenggaraan PKBM.
- 6) Pengelola atau tenaga administrasi pada Taman Bacaan Masyarakat (TBM), yaitu orang yang mendirikan, mengelola dan mengadministrasi kegiatan guna menunjang penyelenggaraan TBM.

5. ANALISIS KONDISI INTERNAL BP PAUD DAN DIKMAS GORONTALO

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pengalihan kewenangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat merupakan tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, maka peran Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) UPTD Provinsi Gorontalo yang memiliki tugas yang sama di bidang Pendidikan Non Formal, dialihkan menjadi UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. BP PAUD dan Dikmas berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,

Seiring dengan beralihnya kewenangan PAUD dan Dikmas tersebut maka nomenkatur BPKB berubah menjadi BP PAUD dan Dikmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa BP PAUD dan Dikmas memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pengembangan program dan mutu di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat maka penyusunan Rencana Strategis harus menyesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat atau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Permendikbud nomor 5 Tahun 2017, BP PAUD dan Dikmas menyelenggarakan fungsi (a) pengembangan program pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat; (b) pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (c) supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (d) fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat; (e) pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (f) pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (g) pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan (h) pelaksanaan urusan administrasi BP PAUD dan Dikmas.

Tantangan yang lebih besar bagi BP PAUD dan Dikmas Gorontalo dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia khususnya di wilayah koordinasi kerja Balai dan perlu mendapat perhatian serius dan fokus, terutama yang berkenaan jumlah Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal yang mulai meningkat, kualitas SDM rendah, mempertahankan jatidiri bangsa, kualitas perempuan dan anak rendah dan meningkatkan kehidupan

beragama dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga dalam penyusunan Rencana Strategis Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Renstra BPPAUD dan Dikmas) Tahun 2015-2019, diperlukan analisis kondisi untuk mengetahui capaian dan permasalahan yang terjadi pada setiap program dan satuan kerja melalui layanan pendidikan, sehingga dapat memperkaya alur pikir dan mengantisipasi hambatan yang akan terjadi dalam tiga tahun ke depan.

Rencana Strategi Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas 2015-2019, menjadi dasar dan pedoman bagi BP PAUD dan Dikmas Gorontalo dalam menyusun Rencana Strategi yang menyajikan sasaran dan target serta strategi pencapaiannya yang dilakukan dalam peningkatan mutu dan akses layanan PAUD dan Dikmas dan sebagai pijakan untuk membuat semua rencana program dan memperbaiki kondisi tersebut menuju kondisi yang dicita-citakan dalam kurun sisa waktu 3 (tiga) tahun yang mendatang. Selain itu pula, penyusunan rencana strategis menggunakan analisis yang bersifat diagnostik dan analisis prospektif.

Analisis diagnostik dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelebihan dan kelemahan dalam kondisi yang ada. Sedangkan analisis prospektif dilakukan untuk memperoleh gagasan-gagasan pengembangan untuk mengubah kondisi yang ada menjadi kondisi yang diinginkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities dan Threats) untuk mengetahui kondisi internal yaitu kekuatan dan kelemahan serta kondisi eksternal yaitu peluang dan ancaman/tantangan. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strength), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Analisa SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktor tersebut.

Pelaksanaan pencapaian target kinerja yang diperjanjikan Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas dilakukan melalui: (1) pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, (2) Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan

Masyarakat, (3) Supervisi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat, (4) Fasilitasi Penyusunan Dan Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat, (5) Pengembangan Sumber Daya Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat, (6) Pengelolaan Sistem Informasi Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat, (7) Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, dan (8) pelaksanaan urusan administrasi BP PAUD dan Dikmas.

Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Gorontalo harus mampu merancang program yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga mampu memberikan pelayanan kepada wilayah binaan di Kabupaten Kota se Provinsi Gorontalo dengan memperhatikan potensi lokal daerah, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Balai harus memberikan pembimbingan dan pembinaan teknis untuk memaksimalkan peran satuan pendidikan pendidikan nonformal dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan proses pembelajaran dan hasil pelaksanaan layanan yang berkualitas/terstandar.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

BP PAUD dan DIKMAS Gorontalo merupakan UPT yang baru saja bergabung dengan Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS sejak 1 Januari 2017. Sebagai lembaga baru tentunya, BP PAUD dan Dikmas Gorontalo memerlukan waktu untuk beradaptasi dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya.

Namun dengan sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap mutu pengembangan program dan model PAUD dan DIKMAS serta peningkatan sumber daya manusia yang semakin tinggi, BP-PAUD dan DIKMAS Gorontalo tetap berusaha untuk selalu menjaga kualitas penyelenggaraan program pengembangan PAUD dan DIKMAS dengan sebaik-baiknya.

1. Potensi BP PAUD DIKMAS

BP-PAUD dan DIKMAS Gorontalo dalam membuat renstra juga melihat kekuatan dan kelemahan yang ada untuk menjalankan program sesuai dengan acuan yang telah di rencanakan, yaitu dengan melihat:

a. Potensi Historis

Sebelum menjadi UPT Pusat dari Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, BP PAUD dan Dikmas Gorontalo merupakan UPT Dinas Pendidikan Provinsi yang bertugas melaksanakan pengembangan, pengkajian, dan pembinaan terhadap peningkatan mutu PTK PAUD dan Dikmas di Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya sehubungan dengan pemberlakuan UU Nomor: 23 Tahun 2014 maka BPKB dialihfungsikan menjadi UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas melakukan Pengembangan Program dan mutu PAUD dan Dikmas sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbud Nomor: 05 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas. Pada dasarnya BP PAUD dan Dikmas sebenarnya memiliki kesamaan tugas pokok dan fungsi dengan lembaga sebelumnya, dengan kesamaan ini diharapkan menjadi kekuatan bagi stakeholder terkait guna melaksanakan tugas-tugas sebagai BP PAUD dan Dikmas Gorontalo.

b. SDM, Struktur Organisasi, dan Sarana Prasarana

1) Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia BP PAUD Dikmas Gorontalo adalah sebanyak 30 (tiga puluh) orang pegawai, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 9 (sembilan) orang dan pegawai perempuan sebanyak 21 (duapuluh satu) orang, yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional umum dan kelompok jabatan fungsional tertentu. Jika dilihat dari kualifikasi pendidikannya, maka dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
	Program Doktor (S3)	-	
	Pascasarjana (S2)	10 orang	
	Sarjana (S1)	12 orang	
	Diploma (D1-D3)	2 orang	
	SLTA sederajat	6 orang	
	SLTP sederajat	0 orang	
	Total	30 orang	

Selanjutnya dari 30 Jumlah pegawai tersebut, jika dilihat dari pangkat dan golongannya adalah 15 orang golongan IV, 9 orang golongan III, 6 orang golongan II, dan tidak ada golongan I. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam melaksanakan tugasnya, didukung oleh tenaga fungsional yaitu Pamong Belajar.

2) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BP PAUD dan Dikmas Gorontalo berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, memiliki susunan organisasi yang terdiri dari :

- 1) Kepala
- 2) Subbagian Umum
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional

Selengkapnya, Struktur Organisasi Balai Pengembangan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Gorontalo dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi memadai. Pada tahun 2017, BP-BP PAUD DAN DIKMAS Gorontalo didukung sebanyak 30 orang PNS terdiri dari Kepala Balai, Kasubbag Umum, Tenaga Fungsional Tertentu (Pamong Belajar) 15 orang dan Tenaga Fungsional Umum 13 orang. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 9 orang dan perempuan 21 orang, yang berkualifikasi pendidikan S2 10 orang, berkualifikasi S1 12 orang, dan Diploma3 2 orang dan yang berkualifikasi SLTA 6 orang. Sedangkan berdasarkan golongan dapat dibedakan bahwa 6 orang golongan II, 9 orang golongan III, dan 15 orang golongan IV, dan didukung oleh Tenaga Kontrak berjumlah 13 orang, terdiri dari Pramubakti 4 orang, Satpam 3 orang, Cleaning Service 5 orang dan Sopir 1 orang. Tenaga PNS dapat diuraikan seperti pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1.

Tenaga PNS BP PAUD dan Dikmas Gorontalo Tahun 2017

STRUKTURAL	PAMONG BELAJAR	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN		GOLONGAN	
		L	P	S2	S1	IV	III
15 orang	15 orang	L	9 orang	S2	10 orang	IV	15 orang
		P	21 orang	S1	12 orang	III	9 orang
				D3	2 orang	II	6 orang
				SLTA	6 orang		
JUMLAH PNS				30 orang			

Tabel 2.

Tenaga Kontrak BP PAUD dan Dikmas Gorontalo Tahun 2017

PRAMUBAKTI	SATPAM	CLEANING SERVICE	SOPIR	JUMLAH
4 orang	3 orang	5 orang	1 orang	13 orang

Komposisi pegawai BP PAUD DAN DIKMAS berdasarkan Pendidikan dan golongan dapat digambarkan seperti pada diagram 1, diagram 2 dan diagram 3.

Diagram 1. Kondisi Pegawai di lingkungan BP PAUD dan Dikmas Gorontalo



6. PILAR-PILAR STRATEGIS

Dalam menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di BP-PAUD dan Dikmas Gorontalo, kerangka dasar yang menjadi rujukan dalam implementasi landasan filosofis

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat mengacu pada strategi pembangunan pendidikan nasional. Strategi pembangunan PAUD-DIKMAS akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pokok dan kerangka implementasi program dan kegiatan pembaruan pendidikan yang akan dilaksanakan oleh BP-PAUD dan Dikmas Gorontalo beserta seluruh pihak yang berkepentingan (Pimpinan/pihak manajemen dan seluruh Pegawai)/steakholder baik dipusat maupun di daerah yang meliputi :

1. Pendidikan agama, akhlak mulia dan pembentukan karakter/kepribadian masyarakat yang mandiri serta memiliki daya saing

2. Proses pembelajaran yang mendidik, dialogis serta pembelajaran berpusat pada peserta didik dan kontekstual
3. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi yang selaras dengan dunia kerja
4. Peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan
5. Penyediaan sarana belajar
6. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan
7. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka, merata, berkelanjutan
8. Pemberdayaan masyarakat, organisasi masyarakat dan asosiasi profesi
9. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan.
10. Sistem pendidikan yang mengarah pada pembentukan manusia yang berkarakter
11. Mengoptimalkan peran perempuan di pedesaan.
12. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
13. Meningkatkan kualitas daya saing SDM dalam menyambut MEA.
14. Mensinergikan pembangunan IPTEK yang dilaksanakan oleh akademisi, badan usaha, dan pemerintah.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

2.1 VISI

Pendidikan Nasional berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Visi ini masih amat relevan untuk dipertahankan, dengan tetap mempertimbangkan integrasi pendidikan dan kebudayaan ke dalam satu kementerian. Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.

Dengan mangacu kepada Nawacita dan memperhatikan visi 2025, serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 adalah "Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong".

Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Meskipun pengertian insan sudah tercakup dalam istilah ekosistem, insan tetap disebut tersendiri. Penyebutan secara demikian dimaksudkan untuk memberi tekanan lebih besar pada arti sangat penting dari peran pelaku dalam suatu ekosistem.

Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut yaitu: 1) sekolah yang kondusif; 2) guru sebagai penyemangat, 3) orangtua yang terlibat aktif; 4) masyarakat yang sangat peduli; 5) industri yang berperan penting; 6) organisasi profesi yang berkontribusi besar; 7) pemerintah yang berperan optimal.

Berpijak dari uraian tersebut diatas Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Gorontalo merumuskan Visi sebagai berikut: "MENJADI BALAI YANG UNGGUL DALAM INOVASI DAN PRIMA DALAM PELAYANAN" Visi BP PAUD dan Dikmas dapat diuraikan sebagai berikut: Unggul dalam Inovasi artinya adalah bagaimana BP PAUD dan Dikmas GORONTALO menyiapkan Sumber Daya Manusia yang selalu unggul dalam berkarya nyata dan mampu menciptakan Model serta mengembangkan model PAUD dan Dikmas, sedangkan Prima dalam Pelayanan artinya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tentang PAUD dan Dikmas dalam rangka Peningkatan Mutu PAUD dan Dikmas di Provinsi Gorontalo.

Perubahan situasi dan kondisi dapat berhubungan dengan perubahan fungsi dan struktur organisasi, tugas-tugas dan fungsi lembaga, perubahan sistem penggajian, dan pengukuran prestasi kerja. SDM BP PAUD dan Dikmas harus mampu menyiapkan diri untuk kompeten dan berdaya saing. SDM yang kompeten akan mampu menyiapkan dan melaksanakan pengembangan program, pelayanan peningkatan mutu SDM PAUD dan Dikmas, merancang dan menyajikan peta mutu yang cepat dan profesional.

Dengan adanya perubahan mainset dan cara bertindak memadai SDM di Balai akan mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menghasilkan output yang berdaya saing. Harapannya output yang dihasilkan akan menjadi alternatif pemecahan permasalahan di lapangan dan pemenuhan tuntutan masyarakat. Output Balai yang mampu memberikan pemecahan masalah inilah yang menjadikan Balai menjadi lembaga "UNGGUL DAN PRIMA". Karena peran balai mampu

meningkatkan kapabilitas dan potensi masyarakat secara efektif dengan memperhatikan karakteristik sasaran program PAUD dan Dikmas.

Untuk mempertegas apa yang dimaksud unggul dan prima dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3.1 Makna Unggul dan Prima

Makna Unggul		Makna Prima
Program	Unggul dalam Program yaitu Program PAUD dan Dikmas yang dilaksanakan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna, mudah dilaksanakan, didukung dengan anggaran dan SDM yang professional, ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.	Prima artinya melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan (masyarakat) dengan ramah, tepat dan cepat, sehingga pelanggan merasa puas.
Proses	Unggul dalam proses, artinya selalu unggul dalam pelaksanaan realisasi program kegiatan dan keuangan, dan unggul dalam proses yaitu: 1) Penyusunan dan penetapan program dilaksanakan secara bersama menyertakan semua unsur terkait secara internal dan eksternal; 2) Sosialisasi dilaksanakan secara komprehensif sehingga semua pemangku kepentingan dapat memahami program secara utuh; 3) program memiliki indikator mutu; 4) Penyelenggaraan program dapat dievaluasi secara sistematis; 5) SDM pelaksana program memiliki integritas dan komitmen untuk pencapaian tujuan	
Produk	Unggul dalam produk, yaitu: 1) Sasaran program dapat memanfaatkan hasil program; 2) produk dapat diakses oleh masyarakat secara lebih luas; 3) produk yang dihasilkan memiliki kualitas.	

2.2 MISI

Misi merupakan strategi dan prosedur-prosedur guna mencapai visi. Pencapaian visi lembaga harus memperhatikan berbagai dukungan sumber daya dan infrastruktur yang sudah ada sekarang agar strategi pencapaian menjadi lebih realistis. Mewujudkan "Misi" harus berpijak pada Visi dan tugas fungsi lembaga. Untuk itu perlu disandingkan visi,

visi, indikator visi dan misi sebagai aksi kerja yang merupakan strategi kerja.

Untuk pencapaian visi BP-PAUD Dan Dikmas Gorontalo, maka ditentukan misi meliputi:

1. Mewujudkan pengkajian dan pengembangan program PAUD dan Dikmas yang berkualitas dan bermfaat
2. Memetakan mutu Satuan PAUD dan Dikmas secara menyeluruh di yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan
3. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan untuk percepatan Standarisasi Satuan PAUD dan Dikmas
4. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program PAUD dan Dikmas yang efektif dan efisien
5. Melakukan pengembangan dan peningkatan mutu Sumberdaya PAUD dan Dikmas yang berkarakter, berkomitmen tinggi dan profesional
6. Mengelola sistem informasi PAUD dan Dikmas yang aktual, cepat, tepat, akurat dan bermanfaat
7. Melakukan kemitraan di bidang PAUD dan Dikmas yang saling menguntungkan dan berkelanjutan
8. Memberikan layanan PAUD dan Dikmas sesuai kebutuhan masyarakat
9. Melaksanakan tatakelola administrasi yang akuntabel dan berbasis elektronik.

2.3 TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Tujuan yang dimaksud disini adalah rumusan kerja untuk mencapai target output yang telah disepakati bersama dan menjadi kontrak kinerja top manajemen. Untuk itu rumusan kerja harus disandingkan dengan "MISI " yang telah dirumuskan diatas. Tujuan yang dirumuskan merupakan strategi dalam mewujudkan " MISI " dan menjabarkan tugas pokok Balai yaitu pengembangan program,

peningkatan sumber daya manusia, pemetaan mutu, publikasi dan kemitraan serta pelayanan prima berbasis system aplikasi.

Dalam upaya merealisasikan visi dan misi BP-PAUD dan Dikmas Gorontalo 2015-2019, dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis BP-PAUD dan Dikmas Gorontalo 2015-2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan Strategi 1 (T1): pengembangan program PAUD Dan Pendidikan Masyarakat bermutu.

Pengembangan model dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat yang mutakhir sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berorientasi pada keterlaksanaan pembelajaran di bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat. Hasil pengembangan model harus dapat menjadi solusi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat yang bermutu.

2. Tujuan Strategis 2 (T2): pemetaan mutu PAUD dan pendidikan Masyarakat .

Standar Nasional Pendidikan yang dirumuskan dalam 8 standar yaitu: 1) Standar Kompetensi Lulusan; 2) Standar Isi; 3) Standar Proses; 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 5) Standar Sarana dan Prasarana; 6) Standar Pengelolaan; 7) Standar Pembiayaan; 8) Standar Penilaian. Akumulasi dari pencapaian 8 SNP direfresentasikan dalam pelaksanaan pemetaan mutu. Oleh karena itu hasil pemetaan mutu harus dapat mencerminkan ketercapaian mutu kelembagaan, sehingga masyarakat sebagai sasaran layanan memiliki keyakinan dan komitmen serta kepastian dalam peningkatan partisipasi terhadap PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

3. Tujuan Strategis 3 (T3): Supervisi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Pengendalian seluruh proses pembelajaran dan pengelolaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat harus dapat terlaksana secara berkelanjutan dan sistematis pada seluruh satuan pendidikan Dikmas. Pelaksanaan pengendalian dilakukan dalam bentuk supervisi menggunakan instrumen yang valid dan reliabel, sehingga hasil yang dicapai dalam pelaksanaan supervisi dapat dijadikan rujukan dalam pembinaan dan pengembangan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

4. Tujuan Strategis 4 (T4): Fasilitasi dalam bentuk pendampingan dan bimbingan penyusunan dan pelaksanaan program.

Demokratisasi penyelenggaraan pendidikan nonformal dilaksanakan untuk memberikan Ketersediaan layanan pendidikan, Keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas mutu layanan pendidikan, mewujudkan kesetaraan untuk pendidikan dan menjamin kepastian layanan pendidikan. Agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang demokratis, maka proses pengelolaan pendidikan dengan melakukan pendampingan dan bimbingan terhadap lembaga dan pengelola pendidikan nonformal, secara terpadu dengan menyertakan seluruh komponen yang bertanggungjawab terhadap lembaga pendidikan.

5. Tujuan Strategis 5 (T5): Pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

Mutu sumber daya PAUD dan Pendidikan Masyarakat dalam seluruh proses penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai standar menurut jenis

layanan satuan pendidikan. Dalam rangka mencapai kuantitas dan kualitas mutu sumber daya PAUD dan Pendidikan Masyarakat, dilaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kebutuhan.

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berorientasi pada persaingan di era teknologi informasi dan wawasan yang memadai baik nasional dan internasional dilaksanakan magang di dalam negeri dan luar negeri bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kelayakan.

6. Tujuan Strategis 6 (T6): Kemitraan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

Penyelenggaraan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat akan bisa terlaksana dengan baik dan sistematis harus dapat melibatkan seluruh komponen dan pemangku kepentingan pendidikan. Dalam rangka menyertakan seluruh komponen dan pemangku kepentingan secara aktif, maka diperlukan adanya kemitraan.

7. Tujuan Strategis 7 (T7): Tatakelola administrasi yang akuntabel dan berbasis elektronik.

Pengelolaan tatakelola administrasi yang akuntabel dan berbasis elektronik harus dapat mencerminkan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam rangka mewujudkan tatakelola tersebut di atas, maka dilaksanakan pembinaan teknis bagi tenaga administrasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat meminimalisir adanya penyimpangan yang dapat menurunkan citra kelembagaan dan kepercayaan publik.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Dalam mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2019. Selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk mengukur apakah sasaran strategis untuk mengkonfirmasi tujuan strategis tersebut dicapai pada tahun 2019. Sasaran strategis BP PAUD dan Dikmas Gorontalo dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Sasaran Strategi BP PAUD dan Dikmas Gorontalo

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
1	Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan Model/Program, PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan Gender, Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global serta replikabel diseluruh regional/wilayah	1) Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan
		2) Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan Model/Program hasil kajian/pengembangan
		3) SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya
		4) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
		5) Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN

Pengukuran keberhasilan penerapan strategi ini dilakukan dengan merumuskan indikator dan target pencapaian yang dijabarkan sebagaimana tercantum dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Indikator dan Target Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategi

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan			5	5	6
2.	Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan Model/Program hasil kajian/pengembangan			250	195	300
3.	SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya			328	284	250
4.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana			11	11	11
5.	Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN			4	4	4

2.5 TATA NILAI

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukungnya. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai yang di utamakan pada Renstra Balai Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Gorontalo 2015—2019 ini adalah sebagai berikut.

1. Memiliki Integritas

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan.

2. Kreatif dan Inovatif

Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru.

3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau untuk menghindari timbulnya masalah.

4. Pembelajar

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kejadian.

5. Menjunjung Meritokrasi

Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.

6. Terlibat Aktif

Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA REGULASI, KERANGKA PENDANAAN DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN BP PAUD DAN DIKMAS GORONTALO

Arah kebijakan Rencana Strategis Balai Pengembangan PAUD Dikmas Gorontalo tahun 2015 - 2019, berpijak pada beberapa arah kebijakan antara lain : (1) Hasil analisis Renstra Ditjen PAUDNI 2010 -2014. (2) Arah kebijakan Ditjen PAUD dan Dikmas, dirumuskan berdasarkan pada RPJMN 2015-2019

Arah kebijakan pembangunan dari BP PAUD dan Dikmas Gorontalo tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN SDM

a. SDM BP-PAUD Dikmas Gorontalo

- 1) Peta Kompetensi SDM BP PAUD Dikmas Gorontalo.
- 2) Peningkatan substansi teknis melalui pelatihan, magang, pendampingan, dan penugasan.
- 3) Pengembangan karier SDM BP PAUD dan Dikmas sesuai ketentuan.

b. SDM GTK di wilayah Binaan BP PAUD dan Dikmas Gorontalo

- 1) Pemetaan mutu GTK PAUD dan Dikmas di wilayah kerja BP PAUD Dikmas Gorontalo.
- 2) Peningkatan mutu GTK PAUD dan Dikmas melalui pengembangan unit percontohan.
- 3) Peningkatan mutu GTK PAUD dan Dikmas melalui labsite percontohan.

2. ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PAUD

a. Pengembangan program PAUD yang bermutu dan menjamin layanan prima bagi masyarakat.

- 1) Pengembangan program yang memenuhi standar nasional pendidikan/terakreditasi.
- 2) Pengembangan Program berorientasi pada peningkatan mutu layanan dan kebijakan lokal.

- b. Perluasan dan peningkatan mutu labsite berbasis percontohan
 - 1) Labsite sebagai media rujukan pemecahan masalah di lapangan.
 - 2) Fasilitasi penempatan Labsite dikabupaten/ kota.
- c. Perluasan jejaring kemitraan untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif
 - 1) Menggalang kemitraan dengan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/ Kota.
 - 2) Menggalang program-program PAUD dan Dikmas melalui kemitraan untuk pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat dengan dinas terkait.

3. ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN MASYARAKAT

- a. Pengembangan program pendidikan masyarakat yang bermutu dan profesional.
- b. Perluasan dan peningkatan mutu labsite pendidikan masyarakat berbasis percontohan.

B. KERANGKA REGULASI .

Kerangka regulasi yang mendukung dan melandasi penyusunan Renstra BP-PAUD dan DIKMAS Gorontalo tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
7. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
10. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025.

11. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
12. Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.
13. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
14. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2011 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Presiden nomer 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara.
16. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015. tentang RPJMN Tahun 2015–2019.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015–2019
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 05 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas.

C. KERANGKA PENDANAAN DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka Pendanaan implementasi Renstra BPPAUD dan Dikmas Gorontalo 2017 s.d. 2019 mencakup: (i) strategi pendanaan pendidikan; (ii) koordinasi, sistem tata kelola dan pengawasan internal, serta (iii) sistem monitoring dan evaluasi yang menjamin terlaksananya fungsi serta tercapainya tujuan PAUD DAN DIKMAS, dan (iv) Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.

- 1. Strategi Pendanaan Pendidikan PAUD dan DIKMAS**
 - a. Prinsip Pendanaan Pendidikan

Dalam implementasinya BP-PAUD dan Dikmas Gorontalo menerapkan prinsip pendanaan pendidikan dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik dalam pengelolaannya. Adapun sumber pendanaan BP PAUD dan Dikmas Gorontalo ditentukan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, kecukupan dan keberlanjutan.

b. Rencana Pendanaan

Rencana pendanaan BP PAUD dan Dikmas Gorontalo dalam kurun waktu 2015–2019 mengacu pada Renstra Ditjen PAUD dan DIKMAS yang telah ditetapkan adapun perencanaan anggaran akan diprioritaskan untuk Pengembangan program PAUD dan Dikmas.

Pengukuran keberhasilan penerapan strategi pendanaan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat BP-PAUD dan Dikmas dilakukan dengan merumuskan indikator dan Koordinasi, Sistem Tata Kelola, dan Pengawasan Internal PAUD dan Dikmas

Koordinasi, tata kelola dan pengawasan internal tersebut harus secara terus menerus ditingkatkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara maksimal. Keberhasilan dalam mengimplementasikan Renstra akan sangat tergantung pada komitmen dalam proses penyusunan dan penjabarannya oleh pengambil keputusan dalam kebijakan, baik program, kegiatan institusi, dan penerimaan dari pemangku kepentingan (stakeholders).

Implementasi koordinasi, sistem tata kelola, dan pengawasan internal dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Koordinasi Perencanaan Program PAUD dan Dikmas

Kegiatan koordinasi perencanaan penyusunan Renstra di BP PAUD dan Dikmas Gorontalo dilakukan melalui workshop Rapat Kerja Tahunan (RKT) BP PAUD dan Dikmas Gorontalo. Pokok pembahasannya adalah arah kebijakan di BP-PAUD dan DIKMAS, sasaran program dan program kerja, serta monitoring dan evaluasi tahunan di BP PAUD dan Dikmas Gorontalo.

b. Sistem Tata Kelola

Implementasi sistem tata kelola pada Renstra BP-PAUD dan Dikmas Gorontalo 2015 – 2019 dapat dilakukan melalui :

- 1) Penguatan sistem tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Satuan Kerja BPPAUD dan Dikmas Gorontalo.
- 2) Penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di BP-PAUD dan Dikmas Gorontalo.
- 3) Menjamin kepastian memperoleh layanan program kegiatan yang lebih baik.

Dalam rangka menjamin kepastian memperoleh layanan program kegiatan yang lebih baik, arah kebijakan yang ditempuh yakni: (1) mengembangkan sistem penilaian kinerja berbasis mutu produktivitas; dan (2) memberikan pelayanan yang lebih kondusif dalam mewujudkan transparansi dan akuntabel pengelolaan program GTK- PAUD dan DIKMAS.

c. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab dari unit utama yang membidangi pengawasan yaitu SPI (Satuan Pengawas Internal) BP-PAUD Dikmas Gorontalo dan Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Disamping pengawasan internal atasan langsung tersebut, pengawasan juga dilakukan oleh pengawasan independen yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden dan Badan Pemeriksa Keuangan yang bertanggung jawab kepada DPR-RI.

2. Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian dan kesesuaian pelaksanaan program antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra BP-PAUD dan Dikmas Gorontalo 2017-2019 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan dan/atau program PAUD dan DIKMAS. Kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan mencakup aspek (1) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; (2) pemerataan dan perluasan akses PAUD dan DIKMAS; (3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan pendidikan.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh BP-PAUD dan Dikmas Gorontalo dengan sasaran wilayah adalah dinas pendidikan kabupaten/kota, UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dan unit lain yang terkait dengan penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas di wilayah Kerja BP PAUD Dikmas Gorontalo

BAB V PENUTUP

Dokumen rencana strategis BP-PAUD dan Dikmas Gorontalo tahun 2015-2019 disusun sebagai perwujudan komitmen organisasi dalam menjawab tantangan penyelenggaraan bidang PAUD DAN DIKMAS di Provinsi Gorontalo. Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta situasi dan kondisi BP PAUD dan Dikmas berada.

Penyusunan Rencana Strategis BP-PAUD dan DIKMAS Gorontalo disusun dan dirancang melalui proses pemikiran, kegiatan dan tindakan yang dinamis dalam rangka penentuan sasaran, sarana, pengalokasian dana, daya, ruang, waktu dan organisasi yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan. Dengan tersusunnya dokumen Renstra yang berkualitas dengan berbasis mutu memungkinkan BP-PAUD dan Dikmas Gorontalo mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara terprogram, terpadu, bertahap, dan berkelanjutan dengan mengedepankan akuntabilitas, pencitraan publik, kejujuran, objektivitas, dan kebermaknaan secara efektif, efisien, sistematis, dan sistemik.

Akhirnya, melalui renstra BP-PAUD dan Dikmas Gorontalo diharapkan capaian kinerja Ditjen PAUD dan DIKMAS, Satuan Pendidikan (propinsi, kabupaten/kota) di wilayah BP-PAUD dan Dikmas Gorontalo baik secara kualitas maupun kuantitas semakin lebih baik, dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya.

**RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
TAHUN 2015 s.d 2019
BP PAUD DAN DIKMAS GORONTALO**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGI	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Layanan Pengkajian Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD dan Dikmas	Tersediannya Hasil Pengkajian dan Pengembangan Model/Program PAUD Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, Pendidikkan untuk pembangunan berkelanjutan (EDS) dan Kewarganegaraan global serta replikabel di seluruh regional/wilayah	1.	Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan.	0	0	5 Naskah	10 Naskah	15 Naskah	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan. 1. Pelaksanaan Studi Pendahuluan a. Penyusunan Rancangan Studi Pendahuluan b. Pelaksanaan Studi Pendahuluan c. Validasi Hasil Studi Pendahuluan & Usulan Pengembangan Model 2. Penyusunan Draft Model a. Penyusunan Draft Model b. Validasi Draft Model c. Revisi draft model 3. Pelaksanaan Ujicoba Model Konseptual dan Operasional a. Ujicoba Model Konseptual b. Revisi Model Konseptual c. Ujicoba Model Operasional d. Review Model Hasil Ujicoba Operasional e. Editing dan Penggandaan Terbatas

											4. Pembakuan Model a. Pembakuan Model b. Penggandaan Model Hasil Validasi
			2.	Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi Standar Nasional.	0	0	250 Lembaga	445 Lembaga	695 Lembaga	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi Standar Nasional. a. Jumlah Lembaga yang dilakukan Pemetaan Mutu Satuan PAUD dan Dikmas b. Jumlah Lembaga yang dilaksanakan Supervisi Satuan PAUD dan Dikmas c. Pengembangan Kemitraan PAUD dan Dikmas: d. Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan : (Manajemen Pelaksanaan BOP SKB)
			3.	Jumlah SDM PAUD-Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya	0	0	328 orang	612 orang	896 orang	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Jumlah SDM PAUD-Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya a. Peningkatan Kompetensi SDM Internal b. Peningkatan SDM Eksternal
			4.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1:	0	0	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1: a. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran b. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

											<ul style="list-style-type: none"> c. Pengelolaan Data dan Informasi d. Pengelolaan Keuangan e. Pengelolaan Kepegawaian f. Pelayanan Umum dan Perlengkapan g. Pelayanan Rumah Tangga h. Pelayanan Humas dan Protokoler
			5.	Layanan Internal (Overhead)	0	0	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Layanan Internal (Overhead) <i>Output:</i> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kapasitas SDM Internal b. Kendaraan Bermotor c. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran d. Gedung/Bangunan
			6.	Layanan Perkantoran	0	0	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Layanan Perkantoran <i>Output:</i> <ul style="list-style-type: none"> a. Gaji dan Tunjangan b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

GORONTALO, JANUARI 2018
KEPALA,

Drs. Hi. BAMBANG KUNAEDI, M.Si
NIP. 19650309 199802 1002

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET PERJANJIAN KINERJA
BPPAUD dan DIKMAS GORONTALO
TAHUN 2018

Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Rincian				Rencana Aksi	Program	Kegiatan/ Output	Indikator Output Kegiatan	Target Output	Anggaran (dalam Ribuan)	Jadwal Kegiatan												Penanggung-jawab	
			TW1	TW2	TW3	TW4							TW1			TW2			TW3			TW4				
			1	2	3	4							5	6	7	8	9	10	11	12						
Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan model/program PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, ESD dan kewarganegaraan global, serta replikabel di seluruh regional/ wilayah	1) Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan	100%	10%	30%	40%	20%	TW 1 : Melaksanakan kegiatan studi pendahulaun yakni studi kepustakaan identifikasi masalah dan pengumpulan data	Pendidikan Anak Usia Dini	Layanan Pengkajian , pengembangan dan pengendalian mutu PAUD dan Dikmas	Jumlah Naskah Model yang dihasilkan	2 Naskah	600,050													Kepala BP PAUD Dikmas Gorontalo	
							TW 2 : Melaksanakan kegiatan FGD Hasil Study Pendahuluan serta kegiatan penyusunan draft model, FGD Draft Model dan Revisi Draft Model, Uji Coba model konseptual																			Kepala BP PAUD Dikmas Gorontalo
							TW3 : Melaksanakan kegiatan Revisi model konseptual serta Ujicoba Model Operasional, dan Kegiatan Labsite Pengembangan Model berupa koordinasi dan Pengadaan APE dan sarana Lainnya di Lab Site Balai																			Kepala BP PAUD Dikmas Gorontalo

Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan model/program PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, ESD dan kewarganegaraan global, serta replikabel di seluruh regional/wilayah							TW 4 : Penyusunan Laporan Supervisi, Perawatan Hasil Supervisi														Kepala BPPAUD dikmas Maluku		
	3) Peningkatan Kompetensi SDM PAUD Dikmas	100%	0%	10%	50%	40%	TW1 : -- TW 2 , Melaksanakan kegiatan peningkatan Komptensi Internal yakni Pemagangan PTK TW3 : Melaksanakan kegiatan Peningkatan kompetensi Eksternal ; Diklat bagi PTK PAUD sebanyak 4 Kali dan 1 Diklat bagi PTK Dikmas TW 4 : Melaksanakan kegiatan Diklat bagi PTK Dikmas sebanyak 3 kali	Pendidikan Anak Usia Dini	Layanan Pengkajian , pengembangan dan pengendalian mutu PAUD dan Dikmas	Jumlah SDM PAUD Dikmas yang meningkat kompetensinya	307 orang	1,206,000,										Kepala BPPAUD dikmas Maluku	
																						Kepala BPPAUD dikmas Maluku	
																							Kepala BPPAUD dikmas Maluku
																							Kepala BPPAUD dikmas Maluku
	4) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana	100%	10%	50%	30%	10%	TW1 : Melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran yakni Koordinasi Program dengan Dinas Provinsi dan Mitra Terkait TW 2 , Melaksanakan pengelolaan data dan Informasi yakni Pengelolaan dan pengembangan Website, Penerbitan Jurnal PAUD dan Penerbitan Buletin PAUD, Penyusunan LAKIP, Pengawasan Internal Balai	Pendidikan Anak Usia Dini	Layanan Pengkajian , pengembangan dan pengendalian mutu PAUD dan Dikmas	Jumlah dokumen perencanaan program dan evaluasi perencanaan	3 Dokumen	675,527,										Kepala BPPAUD dikmas Maluku	
																						Kepala BPPAUD dikmas Maluku	

